PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

2025

PERDA PROV. JATENG NO. 4, LD 2025/ NO. 4, TLD NO. 168

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor transportasi, perlu adanya kepastian dan jaminan kemudahan penyelenggaraan perhubungan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 66 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2017, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah, arah kebijakan dan tataran transportasi wilayah, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelayaran, penyelenggaraan perkeretaapian, fasilitasi penerbangan, pemanfaatan barang milik Daerah untuk kegiatan di bidang perhubungan, sistem informasi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerja sama/kemitraan, perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah, pendanaan, sanksi administratif dan ketentuan penyidikan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025.

- Penjelasan : 22hlm.
- Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah .